

ABSTRAK

Perjanjian kredit Perbankan antara Bank dengan Debitor sejak diundangkannya UU Pengampunan Pajak terdapat suatu permasalahan baru yaitu adanya hak atas tanah yang terdaftar atas nama pihak perantara (*nominee*) dan masih dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit, dijadikan obyek dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak. Dengan akta pernyataan kepemilikan harta, hak atas tanah tersebut diakui sebagai milik Wajib Pajak. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan diatas sampai saat ini belum dapat dilakukan peralihan hak atas tanah dari pihak perantara (*nominee*) kepada Wajib Pajak sehingga adanya akta pernyataan kepemilikan harta dapat mengurangi keyakinan Bank sebagai kreditor terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah obyek Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit. Dari permasalahan tersebut hendak meneliti tentang kedudukan sertipikat Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan yang diakui sebagai milik Wajib Pajak dan upaya hukum yang dapat dilakukan Bank sebagai kreditor dan pemegang Hak Tanggungan berkaitan belum dilaksanakannya peralihan hak atas tanah obyek Hak Tanggungan yang telah diakui sebagai milik Wajib Pajak dalam akta pernyataan kepemilikan harta. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah kedudukan sertipikat Hak Tanggungan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan terhadap objek Hak Tanggungan, tetap mempunyai kedudukan yang kuat berdasarkan Undang – Undang Hak Tanggungan sebagai jaminan Hak Tanggungan yang sah. Akta pernyataan kepemilikan harta hanya berfungsi sebagai deklarasi atas pernyataan harta/tambahan harta yang digunakan Wajib Pajak membenahi administrasi perpajakan dalam SPT.

**Kata Kunci : Kreditor, Bank, Hak Tanggungan, Akta Pernyataan
Kepemilikan Harta**

ABSTRACT

Bank credit agreements between Banks and Debtor since the enactment of the tax amnesty law there is a new problem of land rights listed on behalf of the intermediary (nominee) and still burdened by the rights of liability as collateral credit, is made an object in the implementation of tax amnesty by taxpayers. With the Deed of property ownership, the right to land is recognized as the property of taxpayers. However, with some problems as outlined above to date cannot be carried out the transition of land rights from the intermediary (nominee) to the taxpayer so that the deed of property ownership statement can reduce the Bank confidence as creditors against the legal certainty of ownership rights to the land object's rights as a guarantee of credit. From the problem, we want to examine the position of the certificate of liability to the object of the right to be recognized as the taxpayer's property and the Bank's legal remedy as creditors and the relevant liability holder is not yet The implementation of a transitional right to the land of a dependent object that has been recognized as the taxpayer's property in the intellectual property ownership. Research uses legal research methods with the approach to legislation – invitations and conceptually. The result of this research is the position of the certificate of liability that has been issued by the Land Office on the object of the rights, still has a strong position under the rights of the liability law as a guarantee of the rights Legitimate. the Deed of property ownership only serves as a declaration on the statement of property/additional property which is used tax payer to fix tax administration in the SPT.

Keywords: Creditors, Banks, Liabilities, Property Statement Deed